

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2009 - 2014**

A. Rencana Strategis BKPM Tahun 2009 - 2014

Rencana Strategis (Renstra) BKPM yang disusun merupakan fungsi manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan memperhitungkan berbagai peluang, tantangan dan masalah baik internal maupun eksternal. Rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2009-2014, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan kewenangan tersebut, BKPM telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Visi BKPM

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional”.

Pernyataan Visi diatas mengandung dua frase kunci, yaitu “ daya saing penanaman modal” dan “kualitas perekonomian nasional”. Semangat meningkatkan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2009-2014. Bahwa daya saing nasional, utamanya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat.

Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi nasional yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Arah peningkatan kualitas perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai

BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik.

Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi diatas adalah peningkatan daya saing penanaman modal. Salah satu ukuran daya saing nasional dalam kancha internasional adalah kemudahan berusaha (*easy of doing business*) versi World Bank. Harus dicatat bahwa kriteria daya saing versi World Bank terkait dengan tugas dan fungsi lintas Instansi dan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi BKPM. Meskipun demikian, BKPM mengambil sikap pro aktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama disempurnakan secara terus menerus.

2. Misi BKPM

Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang dilakukan untuk merealisasikan visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai kedepan. Sesuai dengan Visi 2009-2014, misi BKPM meliputi tiga hal sebagai berikut :

- a. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- b. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang disertai dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena *multiplier effect* ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan

wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal disektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (*integrated industry*) menjadi salah satu alternatif untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini, daya saing insutri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi bagian penting dari agenda BKPM dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan BKPM akan dilakukan dalam kerangka penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, termasuk rumusan kebijakan insentif yang menarik. Pendekatan ini pula yang akan menjiwai langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara insatansi di tingkat pusat, pusat dengan daerah, dan antar daerah. Untuk itu peran koordinasi yang dijalankan BKPM sangat penting. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka mpanjang. Hoarmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan kebijakan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan *bourderless*, akses data yang semakin cepat dan akurat, serta berbagai kemajuan kinerja kelembagaan lainnya, adalah beberapa indikator yang sangat erat kaitannya dengan tercapainya harmonisasi kebijakan.

Pernyataan Misi-3 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya berkaitan dengan

penyusunan norma, standar dan prosedur, kriteria dan kompetensi aparatur, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. BKPM akan berperan sebagai pelaksana sistem PTSP di bidang penanaman modal di pusat, dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal di daerah. Dalam lingkup internal BKPM akan terus dikembangkan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Sistem pelayanan mencakup perizinan dan non perizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya pemerataan penanaman modal bisa ditempuh melalui insentif kemudahan penanaman modal di luar Jawa dan atau penanaman modal pada sektor hulu/primer. Di sisi lain, perlu dilakukan terobosan skim-skim pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin inovatif untuk memecahkan permasalahan hambatan penanaman modal di luar Jawa. Wilayah luar Jawa dikenal kaya sumber daya alam, tetapi kurang memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Terbatasnya infrastruktur merupakan hambatan penanaman modal yang belum teratasi sepenuhnya hingga kini, dan menjadi salah satu prioritas nasional RPJMN 2009-2014. Sehubungan dengan adanya beberapa isu strategis yaitu (i) perkembangan realisasi dan penyesuaian target penanaman modal, (ii) penyebaran penanaman modal, dan (iii) peran baru BKPM dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Bidang Infrastruktur, maka telah dilakukan penajaman pada tujuan dan sasaran strategis (Renstra) BKPM 2009 – 2014.

3. Tujuan

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKPM.

Sesuai visi dan misi, tujuan BKPM dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional;
- b. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif;
- c. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal;
- d. Meningkatnya iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
- e. Meningkatnya perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- f. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang penanaman modal;
- g. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal.

4. Sasaran Strategis

Bila tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan, maka sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan itu telah dicapai.

Sasaran Strategis BKPM dalam periode 2009-2014 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;
- b. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
- d. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;

- e. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
- f. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
- g. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

5. Program

Tujuan tersebut dilaksanakan melalui 3 program di bawah ini :

- a. Program peningkatan daya saing penanaman modal.
- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM.

6. Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Arah Kebijakan :

Dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam tahun 2013 guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BKPM ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
- c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UKM.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur BKPM dan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BKPM.

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal;
- b. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah;

- c. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional;
- e. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal;
- g. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
- h. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal dan;
- i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- j. Meningkatkan realisasi, mendorong persebaran penanaman modal dan mendorong berkembangnya kemitraan penanaman modal dengan UKM;
- k. Menyusun rumusan dan rekomendasi kebijakan penanaman modal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. Sasaran Penanaman Modal RENSTRA 2009 - 2014

	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Proyeksi				
			2011	2012	2013	2014	2010-2014
Produk Domestik Bruto Harga Berlaku (Rp Triliun)	5.603,9	6.422,9	7.312,4	8.192,4	9.160,3	10.280,9	41.368,9
PMTB harga berlaku (Rp Triliun)	1.744,4	2.065,2	2.458,0	2.874,8	3.349,0	3.9958,6	14.705,6
Realisasi Penanaman Modal	135,1	208,5	240,0	283,5	390,3	506,9	1.629,2
PMDN (Rp Triliun)	37,8	60,6	62,8	76,7	117,7	177,9	495,7
PMA (Rp Triliun)	97,3	147,9	177,2	206,8	272,6	329,0	1.133,5
PMA (US\$ miliar)	10,4	15,7	18,9	22,0	29,0	35,0	120,6

Asumsi : US\$1 = Rp 9.400,0